|  |
| --- |
|  |

**PERAN *ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES* (ECOWAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI GAMBIA**

**Muhammad Fahrizal[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *The Gambian elections in 2016 raised quite a complicated problem. This is because the incumbent who lost the election was not willing to resign from his position, causing conflict. The purpose of this study is to determine the role of ECOWAS as an international organization in electoral disputes that occur in its member countries. To achieve the research objectives, the type of research that the writer uses is descriptive research. The type of data used is secondary data. The data technique used by the writer is library research technique. In this study the authors used the concept of international organizations to answer the role of ECOWAS. In this dispute, ECOWAS acted as a Mediator, Initiator, Facilitator and Determinator. The results showed that the roles shown by ECOWAS were successful in forcing incumbents to hand over power to the 2016 election winners.*

***Keywords :ECOWAS, Elections, Gambia, International Organization.***

**Pendahuluan**

Menurut *The Intelligence Unit* pada tahun 2016, wilayah Sub-Sahara Afrika menempati posisi dua terendah dari tujuh wilayah demokratis di dunia. Salah satu penyebab rendahnya demokrasi di Afrika dikarenakan buruknya proses pemilihan umum (pemilu). Seperti di kawasan Afrika Barat, dalam rentang waktu enam tahun (2010-2016) telah terjadi tiga kali kisruh dalam proses pemilu, yakni pada pemilu Pantai Gading tahun 2010, pemilu Nigeria tahun 2011, dan pemilu Gambia tahun 2016.

Buruknya proses pemilu di wilayah Afrika salah satunya dikarenakan tidak berjalannya pergantian kekuasaan secara teratur yang mengakibatkan seorang pemimpin akan berkuasa terlalu lama dan cenderung memerintah secara otoriter. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kebijakan yang memungkinkan presiden untuk dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilu tanpa ada batasan periode. Terdapat beberapa negara di wilayah Afrika yang menerapkan kebijakan tersebut seperti Kamerun, Djibouti, Chad, Gabon, Togo, Uganda, Sudan, dan Gambia.

Salah satu kasus pemilu yang berjalan tidak lancar terjadi di Gambia pada tahun 2016. Gambia dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu tiap lima tahun sekali. Dikarenakan Gambia tidak membatasi masa jabatan presiden kedalam beberapa periode maka, Yahya Jammeh sebagai Presiden Gambia terus mencalonkan diri dalam pemilu dan berhasil memenangi pemilu secara berturut-turut pada tahun 1996, 2001, 2006, dan 2011.

Pada tanggal 2 Desember 2016 *Independent Electoral Commission* (IEC) sebagai penyelenggara pemilu mengeluarkan hasil akhir perolehan suara. Berdasarkan hasil tersebut, Adama Barrow berhasil mengungguli perolehan suara dari dua kandidat lainnya sehingga Barrow berhak menjadi Presiden Gambia. Pada awalnya Jammeh menerima hasil tersebut akan tetapi, pada tanggal 5 Desember 2016, IEC menyatakan telah terjadi kekeliruan dalam perhitungan suara di wilayah administrasi Basse, dimana IEC telah keliru dengan menambahkan total suara wilayah Basse ke total suara nasional milik Adama Barrow sehingga menyebabkan suara dari Adama Barrow menjadi sangat banyak (iec.gm, 2016). Adanya kesalahan tersebut membuat IEC menghitung ulang kembali perolehan suara. Setelah dihitung ulang, hasil akhir menunjukkan keunggulan yang lebih tipis antara Barrow dan Jammeh, pada awalnya Barrow unggul 8,8% suara dari Jammeh, setelah dihitung ulang, selisih suara diantara keduanya menyempit menjadi 3,7% suara. Total jumlah suara yang masuk juga menjadi lebih rendah 9,1% dari semula yang berjumlah (578.583) suara (Onuoha dan Ngwu, 2017).

Perbedaan selisih suara yang tipis diantara kedua kandidat membuat Jammeh mengubah sikapnya dengan menolak hasil akhir pemilihan tersebut. Jammeh menuding telah terjadi kesalahan serius yang dilakukan oleh IEC dan menuntut diadakannya pemilu ulang yang lebih transparan dengan komisi penyelenggara pemilihan yang baru selain IEC. Setelah menolak hasil hitung ulang, Jammeh kemudian mengajukan tuntutannya ke Mahkamah Agung sebagai upaya untuk menggagalkan hasil akhir pemilu. Namun, peradilan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jumlah hakim di Mahkamah Agung tidak memenuhi standar konstitusi.

Kurangnya hakim di Gambia mengakibatkan peradilan harus tertunda. Hal ini membuat Jammeh mulai menggunakan kekuasaanya dengan mengerahkan pasukan militer di jalanan ibukota Banjul. Pasukan militer tersebut mulai menggali parit-parit dan membuat benteng pertahanan menggunakan karung pasir. Militer juga menutup paksa stasiun radio serta mengambil alih kantor IEC. Tindakan yang dilakukan pasukan militer ditakutkan oleh rakyat Gambia dapat meningkatkan potensi konflik menjadi lebih besar. Karena itu, banyak rakyat Gambia pergi mengungsi ke negara lain. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sekitar 45.000 orang telah pergi meninggalkan Gambia menuju Senegal serta sekitar 800 orang pergi mengungsi ke Guinea-Bissau untuk menghindari ancaman konflik (unhcr.org, 2017). Adama Barrow yang sedang menunggu pelantikan juga ikut mengungsi ke Senegal dengan alasan keamanan.

Pada tanggal 19 Januari 2017, Adama Barrow resmi dilantik menjadi presiden Gambia. Setelah resmi menjadi presiden Gambia, Barrow langsung mengambil tindakan terkait sikap Jammeh yang menolak turun dari jabatannya. Barrow melalui pidatonya meminta kepada PBB khususnya kepada Dewan Keamanan untuk menegakkan hasil pemilu. DK PBB kemudian mengeluarkan resolusi 2337. Dalam resolusi tersebut Dewan Keamanan mengakui bahwa Adama Barrow adalah pemenang yang sah dalam pemilu 2016 dan berhak menjadi Presiden Gambia. Resolusi juga meminta kepada Yahya Jammeh untuk mengakui hasil akhir pemilu 2016 dengan segera mundur dari jabatannya. Resolusi 2337 juga memberi dukungannya kepada ECOWAS untuk menyelesaikan sengketa pemilu Gambia dengan cara-cara yang lebih politis terlebih dahulu (United Nations Security Council, 2017).

Dengan dikeluarkannya resolusi 2337 dari Dewan Keamanan yang menyatakan dukungannya kepada ECOWAS untuk menyelesaikan permasalahan di Gambia serta sebagai organisasi yang memiliki tugas dalam menjaga stabilitas wilayah regionalnya maka, ECOWAS pun turut membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Gambia yang dimulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.

**Kerangka Teori**

***Organisasi Internasional***

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang melewati batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara yang diharapkan mampu menjalin kerjasama guna mencapai tujuan atau kepentingan bersama para anggotanya. Menurut T. May Rudy Organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1998).

Organisasi internasional terbagi menjadi dua, yaitu *International Governmental Organization* (IGO) yaitu organisasi antar pemerintah yang anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang mewakili sebuah negara secara resmi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) yaitu organisasi internasional yang anggotanya bukan berasal dari pemerintah, dapat berupa kelompok atau individu dari beberapa negara (Bennet, 1997).

Suatu organisasi internasional yang dibentuk dari suatu perjanjian dengan instrumen pokok akan memiliki suatu kepribadian hukum di dalam hukum internasional. Kepribadian hukum ini penting untuk memungkinkan organisasi internasional tersebut dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya dalam melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitas dan hak-hak tertentu dalam rangka menjalankan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya, organisasi internasional memiliki hak-hak tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. ECOWAS sebagai contohnya memiliki *Protocol relating to the Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace-keeping, and Security*, adanya perjanjian tersebut memungkinkan ECOWAS untuk dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi pada negara anggotanya secara legal. Suatu organisasi internasional memiliki struktur untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama, apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Apabila suatu negara tidak dapat menyelesaikan suatu masalah didalam negaranya, maka disaat itulah kehadiran dan peranan dari suatu organisasi internasional dibutuhkan guna menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Andre Pareira, aktivitas yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam upayanya menyelesaikan suatu permasalahan akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu (Pareira, 1999):

1. **Inisiator**

Organisasi internasional akan berperan dalam mengajukan suatu masalah ataupun fenomena yang terjadi kepada komunitas internasional dalam sebuah forum internasional untuk memperoleh sebuah kerjasama dan solusi penyelesaian terhadap suatu konflik yang terjadi. Inisiator adalah suatu kemampuan organisasi dalam menemukan peluang, menemukan ide atau mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu masalah.

2. **Fasilitator**

Organisasi internasional berperan dalam mengupayakan dan menyediakan fasilitas penunjang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga suatu organisasi mampu merealisasikan tujuannya. Memfasilitasi disini dalam arti menyediakan segala hal yang dibutuhkan guna terciptanya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Organisasi dapat menyediakan tempat perundingan, akomodasi, jasa keamanan, dll.

3. **Determinator**

Organisasi internasional mengupayakan untuk memberi serta mengambil keputusan pada suatu masalah. Organisasi internasional dituntut untuk dapat menentukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi. Tentunya sebelum memutuskan suatu tindakan, organisasi terlebih dahulu harus memastikan jika tindakan yang akan diambil dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

4. **Mediator atau Rekonsiliator**

Organisasi internasional dapat berperan dalam suatu penyelesaian sengketa sebagai pihak penengah dengan menjadi wadah negosiasi bagi pihak-pihak yang bertikai dalam suatu sengketa yang terjadi. Proses negosiasi yang dilakukan oleh organisasi internasional digunakan untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang bertikai serta memulihkan kembali hubungan antara pihak yang bertikai pada keadaan semula.

**Metode Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaaan secara objektif agar relevan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan peran dari *Economic Community Of West African States* (ECOWAS) dalam tugasnya menyelesaikan sengketa pemilu di Gambia. Jenis data yang digunakan oleh peneliti berupa data sekunder, dimana data-data dan informasi secara keseluruhan diambil dari temuan-temuan yang dihasilkan oleh pihak lain seperti, buku, jurnal, artikel ilmiah, situs internet, institut dan lembaga terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah library research, yaitu pengumpulan dan pemilihan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, bahan internet, laporan penelitian, serta bahan-bahan lainnya yang relevan dan memiliki tingkat kapabilitas dan validitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik (*Content Analysis*) atau analisis isi yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, sehingga dapat dianalisa secara relevan atas permasalahan yang ada.

**Hasil dan Pembahasan**

***Pemilu Gambia 2016***

Pada pemilu tahun 2016, Jammeh sebagai petahana bersaing dengan dua kandidat lainnya yakni Mammah Kandeh dari partai *Gambia Democratic Congress* (GDC) serta Adama Barrow yang diusung oleh beberapa partai koalisi. Partai-partai oposisi membentuk koalisi guna menantang Yahya Jammeh untuk masa jabatan kelimanya. Koalisi ini bertujuan untuk mengakhiri rezim Jammeh dan mereformasi konstitusi 1997 yang sebelumnya telah diubah oleh pemerintahan Jammeh guna melancarkan kekuasaannya. Koalisi ini dinamakan Koalisi Gambia 2016 yang terdiri atas koalisi tujuh partai oposisi yakni, *United Democratic Party* (UDP), *People’s Democratic Organization for Independence and Socialism* (PDOIS), *National Reconciliation Party* (NRP), *Gambia Moral Congress* (GMC), *National Convention Party* (NCP), *People’s Progressive Party* (PPP) dan *Gambia Party for Democracy and Progress* (GPDP). Calon independen aktivis feminis, Isatou touray dan aktivis senior Fatoumatta Jallow Tambajang juga bergabung dalam koalisi.

Menjelang dilaksanakannya pemilu, ketua koalisi Ousainou Darboe ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Gambia karena melakukan aksi protes pada sebuah demonstrasi. Ditahannya Darboe membuat perlu ditunjuknya seseorang untuk menggantikan posisi ketua koalisi. Koalisi pun sepakat menunjuk Fatoumatta Tambajang untuk menjadi ketua koalisi. Koalisi 2016 Gambia dibentuk untuk mendukung satu calon independen dalam pemilihan presiden tahun 2016. Koalisi sepakat untuk menunjuk dan mendukung Adama Barrow sebagai kandidat mereka. Adama Barrow adalah seorang pengusaha *real estate* dan juga sekaligus menjabat sebagai bendahara partai UDP. Barrow sendiri merupakan politikus baru yang minim pengalaman politik di Gambia, akan tetapi Ousainou Darboe sebagai ketua partai UDP dan mantan ketua koalisi justru sangat mendukung penunjukan Adama Barrow menjadi kandidat presiden.

Pada tanggal 1 Desember 2016 dilaksanakanlah pemungutan suara bagi rakyat Gambia untuk memilih calon presiden. Keesokan harinya, *Independent Electoral Commission* (IEC) sebagai komisi penyelenggara pemilu mengeluarkan hasil akhir perolehan suara. Berdasarkan sistem pluralitas Adama Barrow berhasil mengungguli kandidat lainnya dan berhak menjadi presiden Gambia. Jammeh lewat pidatonya di televisi menerima hasil tersebut dan mengucapkan selamat atas kemenangan Barrow, Jammeh juga mengatakan jika dia tidak akan menghalangi Barrow dalam transisi kepemimpinanan.

 **Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Pemilu Gambia Tanggal 2 Desember 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kandidat Presiden** | **Partai Politik** | **Perolehan Suara** | **%** |
| Adama Barrow | *Coalition 2016* | 263,515 | 45,5 |
| Yahya Jammeh | Alliance for Patriotic Reorientation and Construction | 212,099 | 36,7 |
| Mammah Kandeh | Gambia Democratic Congress | 102,969 | 17,8 |
| Total | 578,583 | 100 |

**Sumber: Onuoha dan Ngwu, 2017**

***Sengketa Hasil Pasca Pemilu Gambia 2016***

Permasalahan pemilu 2016 mulai muncul pada tanggal 5 Desember 2016, ketika IEC menyatakan telah terjadi kekeliruan dalam perhitungan suara di wilayah administrasi Basse, dimana IEC telah keliru dengan menambahkan total suara wilayah Basse ke total suara nasional Adama Barrow sehingga menyebabkan suara dari Adama Barrow menjadi sangat banyak. Adanya kesalahan tersebut membuat IEC harus menghitung ulang perolehan suara kembali yang berimbas pada pengurangan total jumlah suara yang dimenangkan oleh masing-masing kandidat.

Setelah dihitung ulang, hasil revisi tersebut tidak mempengaruhi kemenangan plural bagi Adama Barrow, akan tetapi hasil akhir menunjukkan keunggulan yang lebih tipis antara Barrow dan Jammeh. Pada awalnya Barrow unggul 8,8% suara dari Jammeh namun, setelah direvisi hasil menunjukkan jika Barrow memperoleh 227,708 suara atau 43,3 % suara nasional, dimana hanya unggul tipis 3,7% dari Jammeh yang hanya memperoleh 208,487 suara atau sebanyak 39,6% suara nasional, sementara itu kandidat lainnya Mamma Kandeh memperoleh 89,768 suara atau 17,1% suara nasional. Total jumlah suara yang masuk juga menjadi lebih rendah 9,1% menjadi 525,963 suara dari semula yang berjumlah 578.583 suara.

**Tabel 2. Hasil Akhir Perolehan Suara Pemilu Gambia Tahun 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kandidat Presiden** | **Partai Politik** | **Perolehan Suara** | **%** |
| Adama Barrow | *Coalition 2016* | 227,708 | 43,3 |
| Yahya Jammeh | Alliance for Patriotic Reorientation and Construction | 208,487 | 39,6 |
| Mammah Kandeh | Gambia Democratic Congress | 89,768 | 17,1 |
| Total | 525,963 | 100 |

**Sumber: iec.gm, 2017**

Yahya Jammeh yang pada awalnya menerima hasil akhir tanggal 2 Desember 2016, kini berbalik menentang hasil revisi suara yang dikeluarkan oleh IEC pada tanggal 5 Desember 2016. Pada tanggal 9 Desember 2016, Jammeh berpidato yang disiarkan secara langsung melalui saluran televisi Gambia, dimana dalam pidato tersebut Jammeh dengan tegas menolak hasil revisi yang dikeluarkan oleh IEC. Penolakan tersebut dikarenakan terdapat kelainan atau kecurangan serius dalam pemilihan yang dilakukan oleh IEC. Setidaknya terdapat dua faktor kesalahan teknis dari IEC yang memicu penolakan Jammeh atas hasil tersebut. Pertama, total suara yang dihitung 9,1% lebih sedikit dari yang telah diumumkan IEC pada tanggal 2 Desember, dari yang semula berjumlah 578,583 suara menjadi 525,963 suara. Kedua, bahwa telah terjadi kesalahan serius dari IEC yang telah keliru menambahkan suara milik Jammeh kedalam suara Adama Barrow. Hal ini membuat selisih suara diantara keduanya berubah dari yang semula Barrow unggul 51.416 suara menjadi 19.221 suara.

Jammeh menyebutkan jika pihaknya tidak lagi mempercayai kinerja IEC dalam pemilihan serta menuntut diadakannya pemilu ulang yang lebih adil dengan komisi penyelenggara selain IEC. Pada tanggal 11 Desember 2016, Jammeh membawa tuntutannya ke Mahkamah Agung Gambia sebagai upaya menggagalkan hasil akhir dengan mengajukan gugatan sengketa pemilu. Secara hukum, kandidat dapat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Agung paling lambat sepuluh hari setelah pemilu dilaksanakan. Akan tetapi, tuntutan Jammeh di peradilan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan jumlah hakim di Mahkamah Agung Gambia tidak memenuhi standar konstitusi.

Gambia merupakan negara yang kekurangan pejabat peradilan, sehingga mengharuskan Gambia menggunakan hakim dan pejabat peradilan yang berasal dari negara-negara Afrika Barat. Pemerintah Gambia kemudian meminta kepada ketua hakim dari Nigeria dan Sierra Leone untuk mengirimkan hakimnya ke Gambia, akan tetapi ketua hakim dari negara tersebut menolak untuk mengirimkan hakimnya dikarenakan ketidaksesuaian jadwal. Pada umumnya hakim-hakim tersebut hanya tersedia pada bulan Mei dan November pada tiap tahunnya di Gambia (Ibekwe, 2017). Dengan tidak terlaksananya peradilan membuat Jammeh menurunkan pasukan militernya di ibukota Banjul yang pada akhirnya membuat sekitar 45.000 orang pergi mengungsi guna menghindari ancaman konflik yang akan terjadi.

Pada tanggal 17 Desember 2016, diadakan KTT ke-50 ECOWAS di Abuja, Nigeria, guna membahas mengenai permasalahan di Gambia. Khusus situasi di Gambia, Otoritas Kepala Negara ECOWAS menyetujui beberapa poin, diantaranya:

* + - 1. Sepakat untuk menegakkan hasil pemilihan presiden Gambia pada tanggal 1 Desember 2016.
			2. Menjamin keamanan dan perlindungan Presiden terpilih Adama Barrow.
			3. Para kepala negara di Afrika Barat akan menghadiri secara langsung acara pelantikan Presiden terpilih Adama Barrow yang harus dilantik pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai dengan Konstitusi Gambia.
			4. Meminta kepada pemerintah dan pihak koalisi untuk saling mengutamakan persatuan nasional Gambia.
			5. Sepakat menghormati bahwa hasil pemilihan 1 Desember 2016 adalah sebagai kehendak dari seluruh rakyat Gambia.
			6. Menunjuk Muhammadu Buhari, Presiden dan Panglima militer tertinggi dari Republik Federal Nigeria dan John Dramani Mahama, Presiden Ghana sebagai Mediator dalam situasi di Gambia. Proses mediasi harus dilaksanakan berdasarkan wewenang para kepala negara ECOWAS.
			7. Meminta pengesahan dari AU dan PBB untuk semua keputusan yang diambil atas situasi di Gambia dan juga meminta dukungannya dalam upaya mediasi ECOWAS termasuk penyediaan bantuan teknis jika diperlukan.
			8. Otoritas akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menegakkan secara tegas hasil pemilihan tanggal 1 Desember 2016 (ECOWAS*,* 2017).

***Peran ECOWAS Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Gambia***

Pembahasan mengenai bentuk peran apa saja yang dilakukan oleh ECOWAS dalam penyelesaian sengketa pemilu Gambia 2016 akan dibagi menjadi dua fase waktu. Fase pertama pada saat Adama Barrow belum resmi dilantik menjadi presiden Gambia. Pada fase ini ECOWAS bergerak atas inisiatif sendiri dalam perannya sebagai mediator, inisiator, dan fasilitator. Fase pertama ini dimulai pada tanggal 13 Desember 2016. Sedangkan fase kedua dimulai pada saat Adama Barrow telah resmi dilantik menjadi Presiden Gambia pada tanggal 19 Januari 2017. Pada fase ini ECOWAS telah resmi dimandatkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, peran yang digunakan dalam fase kedua ini adalah determinator. Penulis juga akan mengklasifikasikan beberapa poin putusan KTT ECOWAS kedalam peran-peran yang dilakukan oleh ECOWAS.

* + - * 1. ***Mediator***

Putusan poin ke-6 dari KTT ECOWAS sesuai dengan peran Mediator, dimana organisasi menunjuk beberapa kepala negara anggota untuk menjadi mediator dalam situasi di Gambia. Dimulai pada tanggal 13 Desember 2016, tanpa adanya undangan dari otoritas Gambia, ECOWAS memutuskan untuk mengirimkan komisi mediasi ke Banjul. Tim ini dipimpin langsung oleh Presiden ECOWAS yang juga menjabat sebagai Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf didampingi dengan Presiden dari Nigeria, Ghana, dan Sierra Leone (masing-masing, Muhammad Buhari, John Dramani Mahama, dan Ernest Bai Koroma) dan perwakilan khusus dari PBB untuk Afrika Barat yang juga pernah menjadi Ketua Komisi ECOWAS, Mohammed Ibn Chambas.

Pada akhirnya tim mediasi ECOWAS tidak berhasil dalam meyakinkan Jammeh mundur. Jammeh menolak untuk mengindahkan permohonan delegasi yang meminta agar kehendak rakyat segera dituruti untuk menghindari dari krisis yang akan terjadi. Jammeh bersikeras untuk bertahan hingga adanya mediasi baru, serta meminta ECOWAS untuk menyediakan hakim dari negara anggota untuk mendengarkan petisinya di hadapan Mahkamah Agung Gambia. Setelah mediasi berakhir, Jammeh kemudian memerintahkan pasukan militernya untuk mengambil alih kantor IEC, hal ini menyebabkan staf IEC dilarang untuk memasuki kantor. Beberapa stasiun radio juga diambil alih oleh militer. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon mengatakan jika pengambilalihan kantor ini merupakan tindakan penghinaan terhadap kehendak rakyat Gambia (Farge dan Edward, 2017).

Dijadwalkan pada tanggal 13 Januari 2017, delegasi tingkat tinggi ECOWAS akan kembali menuju ibukota Gambia, Banjul untuk melakukan upaya akhir dalam meyakinkan kepada Yahya Jammeh untuk mematuhi hasil pemilihan dan mundur dari kekuasaannya sekarang karena masa jabatannnya sebagai presiden akan berakhir pada tanggal 18 Januari 2017. Pada kesempatan mediasi kedua ini, delegasi yang dikirimkan mengalami sedikit perubahan dimana, Presiden Sierra Leone, Ernest Bai Koroma yang sebelumnya menjadi tim mediasi pada pertemuan pertama tidak ikut kedalam tim mediasi. John Dramani Mahama tetap ikut dalam delegasi akan tetapi statusnya kini bukan lagi sebagai Presiden Ghana, karena Mahama telah kalah dalam pemilu Ghana yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2016.

Para pemimpin regional Afrika Barat sepakat bahwa diplomasi harus menjadi pendekatan yang diutamakan dalam menyelesaikan kebuntuan di Gambia. Sementara itu, opsi intervensi militer harus menjadi upaya akhir dari ECOWAS. Para pemimpin regional juga sepakat tentang perlunya menjangkau para pemimpin lainnya diluar dari ECOWAS yang dapat menekan langsung Jammeh untuk melepaskan kekuasaannya.

Mediasi kedua yang dilakukan oleh delegasi ECOWAS berakhir dengan kegagalan dalam membujuk Jammeh untuk mundur. Jammeh menolak tawaran untuk diberi suaka di luar Gambia selepas meninggalkan jabatannya. Jammeh juga telah diingatkan bahwa ancaman intervensi militer sebagai upaya akhir ECOWAS akan dilakukan jika dia tidak mau mundur.

* 1. ***Inisiator***

Putusan poin ke-8 pada KTT ke-50 ECOWAS sesuai dengan peran Inisiator, dimana organisasi mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menegakkan secara tegas hasil pemilu 1 Desember 2016, dalam hal ini ECOWAS menginisiasi pembentukan *ECOWAS Military Intervention in The Gambia* (ECOMIG) sebagai upaya akhir dalam situasi di Gambia. ECOMIG merupakan gabungan pasukan militer dari beberapa negara anggota ECOWAS yang memiliki tujuan untuk menegakkan hasil pemilu Gambia 2016 dengan memaksa Yahya Jammeh untuk mundur dari jabatannya.

Perwakilan khusus PBB untuk Afrika Barat, Mohammed Ibn Chambass mengatakan jika ECOWAS telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui pengerahan pasukan militer ke Gambia jika Jammeh tetap menolak untuk mundur pada akhir masa jabatannya. Pada tanggal 14 Januari 2017, pimpinan dan kepala staf dari ECOWAS berkumpul di Abuja, Nigeria, untuk membentuk ECOMIG.

ECOWAS mengultimatum kepada pihak Jammeh untuk segara meninggalkan posisinya sebelum tengah malam tanggal 19 Januari 2017. Jika tidak pasukan gabungan ECOMIG yang terdiri dari anggota militer negara Senegal, Nigeria, Ghana, Mali, dan Togo yang total berjumlah sebanyak 7.000 pasukan akan menginvasi Gambia guna memaksa Jammeh untuk turun. Pada tanggal 18 Januari 2017, pasukan ECOMIG telah mengepung perbatasan Gambia melalui Senegal, bersiap untuk memasuki Gambia.

* 1. ***Fasilitator***

Putusan pada poin ke-2 dan ke-3 KTT ECOWAS sesuai dengan peran Fasilitator, dimana ECOWAS memberikan perlindungan dan keamanan bagi presiden terpilih Adama Barrow di Senegal serta menjadwalkan pelantikan bagi Barrow pada tanggal 19 Januari 2017 yang dihadiri oleh berbagai kepala negara di Afrika Barat. Sesuai dengan kesepakatan dalam KTT ECOWAS, pada tanggal 19 Januari 2017, Adama Barrow mengambil sumpah jabatan dan resmi dilantik menjadi Presiden Gambia. Dalam pelantikan tersebut juga dihadiri oleh berbagai kepala negara Afrika Barat. Adama Barrow kemudian meminta kepada ECOWAS, AU, serta PBB khususnya Dewan Keamanan, untuk mendukung pemerintahannya serta rakyat dalam mengembalikan kedaulatan dan legitimasi konstitusional Gambia (Maclean, 2017).

Pasukan ECOMIG menegaskan jika segala sesuatunya telah dipersiapkan dan pasukan sudah siap untuk melakukan intervensi jika Jammeh belum juga mau melepaskan kekuasaannya pada tengah malam tanggal 19 Januari 2017. Sementara itu, di Banjul, kabinet dari pemerintahan Yahya Jammeh mulai menunjukkan keraguannya kepada Jammeh, secara bertahap beberapa pejabat dan menteri kabinetnya mengundurkan diri, seperti Menteri untuk urusan luar negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Lingkungan.

Kepala Staf Militer Angkatan Darat Gambia, Ousman Badjie, juga telah menyatakan bahwa pasukan Gambia tidak akan menghadapi pasukan ECOMIG apabila pasukan tersebut telah memasuki wilayah Gambia. Badjie mengatakan jika permasalahan ini merupakan perseteruan politik, atas dasar itu Badjie tidak ingin melibatkan pasukannya kedalam pertempuran melawan pasukan regional. Hal ini sangat dimengerti, dikarenakan Ousman Badjie sadar akan perbedaan kekuatan antara pasukannya dan pasukan ECOMIG. Badjie sendiri sebelumnya salah satu komandan yang setia kepada Jammeh akan tetapi setelah melihat banyaknya pasukan ECOMIG, Badjie memilih untuk tidak ikut kedalam pertempuran.

Namun, salah satu unit elit militer Gambia, *Gambia National Guard* akan tetap loyal terhadap Yahya Jammeh dan memilih untuk angkat senjata melawan pasukan ECOMIG. Loyalnya *Gambia National Guard* kepada Jammeh tidak terlepas dari kedekatan etnis mereka yang sama-sama memiliki etnis Jola (Kristanti, 2017). Pasukan pemberontak Casamance yang berada di perbatasan antara Senegal dan Gambia juga akan membantu Jammeh dalam melawan ECOMIG. Pasukan Casamance atau *Movement of Democratic Forces of Casamance* (MFDC) merupakan kelompok separatis yang menginginkan pemisahan wilayah dengan Senegal dan ingin membentuk negara sendiri. Jammeh sendiri dikabarkan sering membantu pendanaan pasukan MFDC, hal ini juga tidak terlepas dari kesamaan etnis antara Jammeh dan kelompok tersebut.

* 1. ***Determinator***

Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan di New York untuk mengeluarkan sebuah resolusi bagi permasalahan yang terjadi di Gambia. Dewan Kemanan kemudian dengan suara bulat mengeluarkan resolusi 2337. Resolusi 2337 disahkan secara bulat oleh 15 suara anggota Dewan Keamanan, anggota tersebut diantaranya: 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni, Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Rusia, dan Tiongkok ditambah dengan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yakni, Bolivia, Ethiopia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Mesir, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay. Senegal yang juga menjadi salah satu anggota non permanen dalam DK menjelaskan jika resolusi ini merupakan upaya diplomatik dari ECOWAS yang dibawa ke Dewan untuk meminta persetujuan dari DK PBB.

Dalam Resolusi 2337, DK PBB mendukung dan mengakui Adama Barrow sebagai Presiden terpilih Gambia pada pemilu 2016, serta meminta Yahya Jammeh untuk mundur dan melakukan proses transisi kepemimpinan yang damai kepada Adama Barrow. Resolusi juga menyatakan dukungan penuhnya kepada ECOWAS dalam memastikan penghormatan atas kehendak rakyat Gambia dengan cara politis terlebih dahulu (United Nations Security Council, 2017). Tindakan tersebut sesuai dengan putusan poin ke-8 pada KTT ECOWAS, dimana otoritas sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menegakkan hasil pemilihan pada tanggal 1 Desember 2016, dalam hal ini ECOWAS memasuki wilayah Gambia menggunakan pasukan ECOMIG untuk memaksa Jammeh turun.

Tenggat waktu yang telah diberikan ECOWAS kepada Jammeh telah habis. Pada tengah malam tanggal 19 Januari 2017 pasukan ECOMIG mulai memasuki wilayah Gambia untuk memaksa Jammeh turun. Pasukan ECOMIG mengintervensi wilayah Gambia dengan berdasar hasil KTT ECOWAS pada 17 Desember 2016 serta ditambah dengan berdasarkan permintaan dari Presiden yang resmi telah dilantik, Adama Barrow dan Resolusi 2337. Operasi ini dinamai “*Operation Restore Democracy*”.

Ketua Komisi ECOWAS, Marcel Alain De Souza, menyatakan jika pasukan ECOMIG mengintervensi Gambia melalui darat, blokade laut, dan bantuan dari udara. Sebanyak 7000 prajurit berpartisipasi dalam misi ini untuk mengembalikan demokrasi di Gambia. Pada jam-jam awal intervensi, terjadi bentrokan kecil yang terjadi di perbatasan Kanilai, kota tersebut merupakan kota asal dari Yahya Jammeh. Serangan tersebut melibatkan pasukan ECOMIG melawan pasukan pro-Jammeh dan pasukan MFDC. ECOMIG yang unggul dalam jumlah personel dan persenjataan pada akhirnya mampu memukul mundur pasukan Jammeh dan mengambil alih kota Kanilai.

Pada tanggal 20 Januari 2017, operasi militer ECOMIG ditunda guna memaksa upaya perundingan akhir dengan Yahya Jammeh. Perundingan menit akhir ini diadakan di Banjul dan melibatkan Presiden Guinea, Alpha Conde, Presiden Republik Islam Mauritania, Mohammed Abdel Aziz, serta perwakilan PBB untuk Afrika Barat Mohammed Ibn Chambas. Hadirnya Presiden Republik Islam Mauritania yang juga dikenal dekat dengan Yahya Jammeh diharapkan dapat membuat negosiasi menjadi lebih mudah.

Tim mediasi kemudian meminta sekali lagi bagi Jammeh untuk mundur guna mencegah pertumpahan darah. Pada akhirnya di tanggal 21 Januari 2017, Jammeh berpidato melalui televisi nasional yang isinya adalah setuju untuk melepaskan kekuasaannya dan melakukan transisi kepada Adama Barrow. Sesuai dengan kesepakatan dari perundingan akhir antara Yahya Jammeh dan tim mediasi, Jammeh akan memenuhi permintaan tim mediasi dengan syarat Jammeh mendapatkan jaminan yang telah disetujui oleh ECOWAS, AU, dan PBB, dimana dalam jaminan tersebut pemerintah Gambia yang baru harus dapat memastikan permintaan khusus bagi Jammeh, keluarga, beserta dengan anggota rezimnya dapat terpenuhi. Jammeh meminta jaminan bahwa segala asset yang dimilikinya adalah tetap dan tidak dapat disita oleh pemerintah, Jammeh memiliki asset senilai 11,4 juta Dollar AS yang juga termasuk beberapa koleksi mobil mewah. Jammeh juga meminta untuk disediakan akomodasi untuk pergi ke pengasingannya di Guinea Ekuatorial, Afrika Tengah, dimana dia tidak akan ditangkap dan diadili atas pelanggaran HAM yang telah dilakukannya semasa menjabat (Dugbenu, 2018).

Pada tanggal 8 Februari 2017, Barrow meminta kepada pasukan ECOMIG untuk tetap berada di Gambia dalam mandat selama enam bulan yang dapat diperbaharui (africa-eu-partnership.org, 2017). Jumlah personil ECOMIG juga mengalami pengurangan dengan total akhir berjumlah 2.500 personil militer yang bertugas dalam memberikan perlindungan kepada Presiden beserta jajaran pemerintahnya dan menjaga lokasi-lokasi strategis seperti bandara dan pelabuhan. ECOMIG juga akan melakukan patroli dan memberikan pelatihan kepada Angkatan Bersenjata Gambia.

Dalam bulan-bulan berikutnya pasukan ECOMIG kembali mengurangi personilnya, sehingga hanya tersisa sekitar 500 personil yang terdiri dari tentara Senegal (250), Nigeria (200) dan Ghana (50). Dalam melakukan tugasnya, ECOMIG beberapa kali harus bentrok dengan pasukan pro-Jammeh yang masih tersisa. Pada 21 April 2017, terjadi keributan kecil dirumah bekas kediaman Yahya Jammeh yang dijaga oleh pasukan pro-Jammeh, bentrokan ini mengakibatkan tiga orang terluka. Pada 2 Juni 2017, satu warga sipil dinyatakan tewas tertembak, sembilan orang terluka, serta 22 orang ditangkap atas demonstrasi di Kanilai yang memprotes kehadiran ECOMIG di Gambia. Pada tanggal 5 Juni 2017, mandat enam bulan ECOMIG di Gambia telah habis yang kemudian diperpanjang kembali untuk mandat selama satu tahun kedepan (reuters.com, 2017).

**Kesimpulan**

ECOWAS sebagai organisasi internasional khususnya untuk wilayah Afrika Barat memberikan peran yang signifikan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu 2016 di Gambia. Peran ECOWAS terbagi menjadi dua fase. Fase pertama disaat Adama Barrow belum dilantik menjadi Presiden Gambia dan fase kedua ketika Adama Barrow telah resmi dilantik menjadi Presiden. Menurut Andre Pareira, aktivitas yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam upayanya menyelesaikan suatu permasalahan akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator dan determinator. Peran-peran tersebut juga dapat disesuaikan dengan poin-poin yang telah diputuskan pada KTT ECOWAS ke-50.

Pada fase pertama, ECOWAS menggunakan beberapa perannya, diantaranya sebagai Mediator dengan bertindak cepat tanggap dengan mengirimkan tim mediasi yang terdiri dari beberapa pemimpin negara di Afrika Barat untuk bernegosiasi dengan pihak Yahya Jammeh, tindakan ini sesuai dengan poin ke-6. Selanjutnya peran sebagai Inisiator, dimana ECOWAS menginisiasi pembentukan ECOMIG sebagai upaya akhir dalam memaksa Jammeh untuk turun dari jabatannya, hal ini sesuai dengan bunyi poin ke-8. Selanjutnya peran sebagai Fasilitator, dimana ECOWAS bertindak dengan memberikan perlindungan kepada Adama Barrow dan menyiapkan pelantikan yang dihadiri oleh berbagai kepala negara Afrika Barat, tindakan ini sesuai dengan poin ke-2 dan ke-3 dari pututsan KTT ECOWAS.

Fase kedua dimulai ketika Adama Barrow telah resmi dilantik sebagai Presiden pada 18 Januari 2017. Barrow melalui pidato setelah pelantikannya meminta kepada ECOWAS untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan di Gambia. ECOWAS menindaklanjuti permintaan dari presiden Gambia dengan bertindak sebagai Determinator, dimana ECOWAS menginvasi wilayah Gambia menggunakan pasukan ECOMIG untuk memaksa Yahya Jammeh melakukan transisi kepemimpinan kepada Adama Barrow, tindakan tersebut sesuai dengan poin ke-8 dari KTT ECOWAS.

Peran-peran yang telah dilakukan oleh ECOWAS pada akhirnya mampu membuat Yahya Jammeh menyerah. Pada tanggal 21 Januari 2017, Jammeh mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden Gambia dan pergi ke pengasingannya di Guinea Ekuatorial, Afrika Tengah. Presiden Barrow kemudian meminta kepada pasukan ECOMIG untuk tetap berada di Gambia dalam mandat selama enam bulan yang dapat diperbaharui. ECOMIG bertugas dalam memberikan perlindungan kepada Presiden beserta jajaran pemerintahnya dan menjaga lokasi-lokasi strategis seperti bandara dan pelabuhan. ECOMIG juga terus melakukan patroli dan memberikan pelatihan kepada Angkatan Bersenjata Gambia.

**Daftar Pustaka**

Africa-eu-partnership.org.2017. “*Mission in The Gambia (ECOMIG)*”*,* dalam https://www.africa-eu-partnership.org/en/projects/mission-gambia-ecomig, diakses pada 21 Agustus 2019.

Bennet, Leroy. 1997. *International Organizations: Principle and Issues*. New Jersey: Prentice hall Inc.

Dugbenu, Rita A. 2018. *The Role of ECOWAS in Managing Post-Election Crises in West Africa: The Case of Ivory Coast and The Gambia*. University of Ghana.

ECOWAS. 2017. *Fiftieth Ordinary Session of The ECOWAS Authority of Heads of State and Government*

Farge, Emma dan Edward McAllister. 2017. *“Gambia’s Jammeh must leave power when term ends: United Nations*”, dalam https://www.reuters.com/article/us-gambia-election-/gambias-jammeh-must-leave-power-when-term-ends-united-nations-idUSKBN1431U, diakses pada 9 Juli 2019.

Ibekwe, Nicholas. 2017.“*Gambia: How Nigeria blocked Gambian Supreme Court from sitting for Jammeh*”*,* dalam https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/220090-gambia-how-nigeria-blocked-gambian-supreme-court-from-sitting-for-jammeh-html, diakses pada 25 Januari 2019.

Iec.gm. 2017. *“The total of final election results*”*,* dalam www.iec.gm/the-total-of-final-election-results, diakses pada 2 April 2018.

Kristanti, Elin Yunita. 2017. “*Presiden Gambia Terpilih Dilantik di Negeri Tetangga*”*,* dalam https://www.liputan6.com/global/read/2832205/presiden-gambia-terpilih-dilantik-di-negeri-tetangga, diakses pada 20 Agustus 2019.

Maclean, Ruth. 2017. *“Troops enter the Gambia after Adama Barrow is inaugurated in Senegal”*, dalam https://www.theguardian.com/world/2017/jan/19/new-gambian-leader-adama-barrow-sworn-in-at-ceremony-in-senegal, diakses pada 19 Agustus 2019.

Onuoha, Freedom dan Elias C. Ngwu. 2017. *The Unfolding Political Impasse in the Gambia,* Aljazeera Centre for Studies.

Pareira, Andre. 1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Reuters.com. 2017. *“West African regional bloc extends military mission in Gambia*”*,* dalam https://www.reuters.com/article/us-gambia-security/west-african-regional-bloc-extends-military-mission-in-gambia-idUSKBN18W23F, diakses pada 21 Agustus 2019.

Rudy, T. May. 1998. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Unhcr.org. 2017. *“Some 45.000 people have fled uncertainty in Gambia as tension mounts*”*,* dalam www.unhcr.org/news/latest/2017/1/58822d404/45000-people-fled-uncertainty-gambia-tension-mounts.html, diakses pada 3 April 2018.

United Nations Security Council. 2017. “*Security Council Resolution 2337*”.

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fahrizalmuhammad6@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)